

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME**

**DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**SISWANDI**

**NIM. 10875008352**



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2013**

# **OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

## **ABSTRAK**

Oleh

Siswandi

*Penelitian ini berjudul” Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir”. Adapun dalam penelitian ini perumusan masalah diajukan dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimanakah sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir...? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu berupa data skunder dan data primer berupa hasil kuisisoner dan wawancara, sehingga mampu menjelaskan secara mendalam tentang sistem dan Prosedur penerimaan pajak reklame yang di laksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penelitian, penerimaan pajak reklame dapat dikatakan bahwa sumber ini cukup besar. Tetapi bila dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak reklame belumlah optimal dimana pada Tahun 2012 penerimaan pajak reklame tidak mampu mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 217.000.000,00 dan hanya teralisasi sebesar Rp. 143.842.909,00 atau sekitar 69,76%, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dimana sebagian wajib pajak yang mengisi SPTPD sering mengalami kesalahan yaitu tidak mencantumkan jenis reklame yang dipasang sehingga penetapan yang sudah dipasang berdasarkan SPTPD tidak sesuai dengan data yang telah ditetapkan dilapangan serta masih adanya tunggakan pajak reklame oleh wajib pajak di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, kurangnya sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak yang melanggar, membuat sebagian besar wajib pajak melanggar aturan yang telah dibuat sesuai dengan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sehingga penerimaan pajak reklame tidak dapat terlaksana dengan baik.*

*Kata Kunci: Pajak Reklame, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Reklame.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun skripsi yang mengambil judul **“OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN ROKAN HILIR”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis; Bapak Surya dan Ibu Arfah, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-mudahan perjuangan Bapak dan Ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.
2. Bapak Prof. Dr. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Pembantu Rektor I, II, III, IV yang telah

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Almasri, M.Si, dan Ibu Irdyanti, S.Ip, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji, serta Bapak Rusdi S.Sos, M.A, dan Bapak Muslim, S.Sos, M.Si, selaku Penguji I dan Penguji II pada ujian Munaqasah skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Buat keluarga Bang Zainal Abidin dan kak Sri Hartati, keluarga Bang Karni dan kak Jumiati, serta keluarga Bang Cahyo Iswanto, SP dan kak Lismawati, S.Kom. terima kasih atas supportnya selama ini. Serta buat Bang Siswadi, SH. Juga buat keponakanku; Zarina Khairun Nisa, Suci Kartika, Tasya Denova, Faiz Syahreza, Ziyah Adiva Iswanto, dan Jihan Ramadhani, doa Oom selalu

buat kalian semua semoga menjadi anak yang berguna bagi Bangsa dan Negara dan menjadi anak-anak yang sholeha dan sholehah Aminnnn.

9. Buat Aan Parlina, SH yang banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu terutama Lokal C angkatan 2009 Jurusan Adm. Negara; Muhamad Sanusi, S. Ap, Jefrizal, S. Ap, Ahmad Fahri, S. Ap, Fransiska Oktaviana N, S. Ap, Khairun Nisa, S. Ap, Ayu Lestari, S, Ap, Halimah, S. Ap. Buat Tim Futsal ANA C 09; Zainuddin, S. Ap, Al hafizudin, S. Ap, Rahmad Adi Gunawan, S.Ap, Muhammad Ilham Kurniawan, S. Ap, Ari Muhammad gadhafi, S.Ap, Irfan Utama Putra, S. Ap, Buat Teman-teman KKN, Buat Teman Satu Kost; Muhammad Khosiin, Rifial Gultom, Itok sawito, Romy syafril, S. Ap, Riski Saragih.SE, Indra Gunawan, S. Ap, Parhimpunan, S. Ap, kemudian buat sahabat-sahabat, Abdul Aziz, Ilham, Abdi Chandra, Anto Baron, Darwin, Reyhan, Rival Aditya, Ijal, Aal, Risky, Arman, serta buat Ariel, serta buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, *you're all my best friend*.

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Pekanbaru, 03 Agustus 2013**

**Penulis**

**SISWANDI**  
**10975008352**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Pengertian Optimalisasi .....	12
2.2. Penerimaan.....	13
2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	14
2.4. Pajak .....	16
2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	18
2.6. Tinjauan Pajak Dalam Islam .....	19
2.7. Pajak Daerah .....	20
2.8. Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah .....	23
2.9. Pajak Reklame .....	24
2.10. Objek dan Subjek Pajak Reklame.....	25
2.11. Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Reklame.....	27
2.12. Penetapan Kawasan / Zona .....	29
2.13. Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif Pajak Reklame .....	30
2.14. Tata Cara Penetapan Pajak Reklame .....	37

2.15. Definisi Konsep .....	42
2.16. Konsep Operasional.....	43
2.17. Penelitian Terdahulu .....	45
2.18. Kerangka Berfikir .....	46
 <b>BAB III METODELOGIPENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3. Populasi dan Sampel.....	48
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	50
3.5. Metode Analisis .....	50
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir .....	53
4.2. Pemerintah .....	55
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kabupaten Rokan Hilir .....	60
 <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1. Identitas Responden .....	65
5.1.1. Jenis Kelamin .....	65
5.1.2. Tingkat Usia/Umur .....	66
5.1.3. Tingkat Pendidikan.....	67
5.2. Prosedur Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir .....	68
5.2.1. Pendaftaran dan Pendataan .....	68
5.2.2. Perhitungan dan Penetapan.....	76
5.2.3. Pembukuan dan Pelaporan.....	84
5.2.4. Pembayaran dan Penagihan/Pemungutan .....	92
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1. Kesimpulan .....	110
6.2. Saran .....	114
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 .....	5
Tabel 1.2.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir .....	8
Tabel 2.1.	Kawasan reklame di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.....	29
Tabel 2.2.	Penyelenggaraan reklame dalam Sarana Pemerintah .....	34
Tabel 2.3.	Penyelenggaraan reklame diluar Sarana Pemerintah.....	34
Tabel 2.4.	Tabel Nilai Tarif Jual Objek Pajak Reklame (NOJP).....	34
Tabel 2.5.	Table reklame insidentil.....	35
Tabel 2.6.	Konsep Operasional Penelitian .....	44
Tabel 3.1.	Keadaan Sub Populasi dan Sampel Penelitian.....	49
Tabel 4.1.	Kecamatan, Ibu kota Dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir .....	56
Tabel 5.1.	Klasifikasi Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
Tabel 5.2.	Klasifikasi Jumlah Responden Menurut Tingkat Usia/Umur.....	66
Tabel 5.3.	Klasifikasi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	67
Tabel 5.4.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Telah Mengikuti Prosedur Pendaftaran Dengan Benar .....	68
Tabel 5.5.	Tanggapan Responden Terhadap Semua Wajib Pajak Reklame Telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir .....	70
Tabel 5.6.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Memudahkan Pegawai Dalam Melakukan Pendaftaran Dan Pendataan .....	71
Tabel 5.7.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Memahami Proses Pendaftaran Dan Pendataan di Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir .....	72
Tabel 5.8.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Tepat Waktu Dalam Melakukan Proses Pendaftaran Dan Pendataan .....	73



Tabel 5.9.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Reklame .....	74
Tabel 5.10.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Memudahkan Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Melakukan Proses Perhitungan Dan Penetapan .....	77
Tabel 5.11.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Mengerti Proses Perhitungan Dan Penetapan Yang dilakukan Oleh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	78
Tabel 5.12.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Mematuhi proses Perhitungan Dan Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	79
Tabel 5.13.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Jujur Dalam Proses Perhitungan Dan Penetapan Yang dilakukan Oleh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	80
Tabel 5.14.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Tidak Pernah Melakukan Protes Terhadap Hasil Perhitungan Pajak Reklame Yang dilakukan Oleh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	81
Tabel 5.15.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Proses Perhitungan Dan Penetapan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir .....	83
Tabel 5.16.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Setiap Tahunnya Menyelenggarakan Pembukuan Dan Pelaporan Sendiri .....	85
Tabel 5.17.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Telah Sepenuhnya Melaporkan Penyelenggaraan Reklamennya Kedinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	86
Tabel 5.18.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Memudahkan Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Melakukan proses Pembukuan Dan Pelaporan ..	87
Tabel 5.19.	Tanggapan Responden Terhadap Semua Wajib Pajak Reklame Telah Mengikuti Proses Pembukuan Dan Pelaporan .....	88
Tabel 5.20.	Tanggapan Responden Terhadap Proses Pembukuan Dan Pelaporan Wajib Pajak Reklame Dapat Berjalan Dengan Baik .....	89

Tabel 5.21.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Reklame.....	90
Tabel 5.22.	Tanggapan Responden Terhadap Sistem Dan Prosedur Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Reklame Berjalan Dengan Baik.....	94
Tabel 5.23.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Tepat Waktu Dalam Membayar Pajak Reklamenya.....	95
Tabel 5.24.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Melakukan Pembayaran Sesuai Dengan Sistem Dan Prosedur Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah.....	96
Tabel 5.25.	Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Mematuhi Sistem Dan Prosedur Dalam Proses Pembayaran Dan Penagihan/Pemungutan Pajak Reklame.....	97
Tabel 5.26.	Tanggapan Responden Terhadap Semua Wajib Pajak Reklame Sudah Melunasi Tunggakannya Sebelum Jatuh Tempo Pembayaran .....	98
Tabel 5.27.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pembayaran Dan Penagihan/Pemungutan Pajak Reklame.....	100
Tabel 5.28.	Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten okan Hilir.....	102

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1.	Kerangka Berfikir .....	46
-------------	-------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Daerah sebagai bagian Integral dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dan Pengaturan Sumber Daya Nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penyelenggaraan Pemerintah sebagai subsistem Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan Pemerintahan Daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang dewasa ini telah menempatkan

Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih terlaksana dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mentingkan keinginan pemerintah pusat sebagaimana telah terjadi dimasa yang lalu.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di atur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari pendapatan asli daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun dengan cara eksentifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat akan tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Mariho.P.Siahaan : 2005 : 15 ) yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan pisahan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah
- 2. Dana perimbangan
  - 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 4. Pembiayaan yang bersumber dari
    - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
    - b. Penerimaan pinjaman daerah
    - c. Dana cadangan daerah
    - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sementara itu dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah.

Dengan demikian faktor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting untuk membantu lancar jalannya rodapemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah).

Jadi, dengan demikian, pajak merupakan pungutan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah karena seluruh rangkaian kegiatan pemerintah dan pembangunan tidak akan lepas dari biaya yang sangat besar disamping itu juga biaya atau dana merupakan tulang punggung bagi pelaksanaan aktivitas pemerintahan daerah.

Begitu juga daerah Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonom lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin ataupun pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar maka dinas pendapatan selaku unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan dari pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerang Jalan
6. Pajak hasil galian golongan C

7. Pajak Pengambilan hasil laut dan budidaya perikanan
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Pendapatan Perusahaan
10. Pajak usaha penyewaan bangunan

Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, penerimaan atau pemungutan diatas merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hilir. Sehingga setiap Kecamatan dan instansi akan memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir. Berikut daftar wajib pajak reklame yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kabupaten rokan Hilir :

**Tabel 1.1. Daftar Wajib Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Bangko</b>	<b>36</b>
<b>2</b>	<b>Tanah Putih</b>	<b>32</b>
<b>3</b>	<b>T. P. TJ. Melawan</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Bangko Pusako</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Rimba Melintang</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Kubu</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Bagan Sinembah</b>	<b>59</b>
	<b>Total</b>	<b>155</b>

*Sumber : Dinas Pendapatan Kabuten Rokan Hilir, 2012*

Dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 3 objek pajak reklame antara lain :



(1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(2) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat, striker.
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.
- g. Reklame apung.
- h. Reklame suara.
- i. Reklame film/ slide.
- j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 4 dijelaskan subjek pajak reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Adapun pajak reklame ini memberikan kontribusi yang sangat banyak atau besar terhadap penerimaan PAD yaitu pada Tahun 2008 penerimaan pajak reklame memberikan sumbangan atau kontribusi sebesar Rp. 67.057.000. Dan pada Tahun 2009 yaitu memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp.89.457.640. Kemudian pada Tahun 2010 memberikan sumbangan sebesar Rp. 107.035.200. Kemudian pada Tahun 2011 penerimaan pajak reklame ini memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp.156.168.000.Sedangkan pada Tahun 2012 memberikan sumbangan sebesar Rp.143.842.909.

Dalam melaksanakan penerimaan pajak reklame ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame.

Pajak reklame merupakan iuran atau pemungutan yang wajib dibayar atas pemakaian atau pemanfaatan usaha penyelenggaraan reklame dan sejenisnya yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 25% dari nilai sewa objek pajak yang

diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan dan pembangunan yang diciptakan dapat tercapai dengan baik.

Target penerimaan pajak reklame ditetapkan terhadap setiap wajib pajak reklame perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawab yakni sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Tahun	Terget (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2008	35.520.000	67.057.000	188,79
2	2009	35.520.000	89.457.640	251,85
3	2010	65.000.000	107.035.200	164,67
4	2011	100.000.000	156.168.000	156,17
5	2012	217.000.000	143.842.909	69,76

*Sumber : Dinas Pendapatan Kabuten Rokan Hilir, 2012*

Dalam penelitian ini peneliti meneliti pada Tahun 2012 yang mana pada Tahun 2012 target yang telah ditentukan tidak berjalan sesuai target yaitu mengalami penurunan yang sangat rendah sebanyak 69,76%. Namun yang menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam penerimaan pajak reklame tersebut masih terdapat gejala yang dinilai akan mempengaruhi penerimaan pajak reklame tersebut :

1. Adanya kenaikan tarif pemungutan pajak reklame sebesar 15 % dari yang sebelumnya hanya 10 % menjadi 25 %.
2. Belum optimalnya sistem kerja pihak Dipenda selaku unsur pelaksanaan dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sehingga satuan unit kerja terkait dengan kegiatan pemungutan pajak reklame belum mampu mencapai penerimaan sesuai target.
3. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak reklame dalam melakukan pemasangan reklamenya. Seperti pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan prosedur, pemasangan reklame yang dilakukan malam hari, pemasangan spanduk atau baliho pemilu yang tidak terdaftar.

Dengan demikian sistem kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah di tetapkan seperti halnya dengan penerimaan pajak reklame sehingga tanpa adanya tata kerja yang baik maka target yang ditetapkan tidak akan tercapai dengan optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas serta dengan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu: **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hilir”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, serta belum optimalnya pencapaian target penerimaan pajak reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir tersebut, maka dapat dirumuskan

permasalahan penelitian yaitu : “ **Bagaimanakah sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir** “.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Rokan Hilir.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Memberikan masukan atau informasi pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir tentang penerimaan pajak reklame
2. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat di kemudian hari.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial khususnya Jurusan Administrasi Negara.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### **Bab II : Telaah Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau definisi, hipotesis, konsep operasional dan variabel penelitian

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini akan diuraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **Bab IV : Gambaran Umum**

Dalam bab ini menguraikan sejarah kabupaten Rokan Hilir, penduduk, sosial, geografis dan monografis Kabupaten Rokan Hilir, keberadaan Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir

### **Bab V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian.

### **Bab VI : Kesimpulan Dan Saran** Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Optimalisasi**

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasil guna dan berdayaguna. Untuk itu dalam pembahasan ini, akan dikemukakan pengertian dan efisiensi terlebih dahulu.

Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta ( 1997 :753 ) dikemukakan bahwa : “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1996 : 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasilguna dan berdayaguna. Untuk itu dalam pembahasan ini, akan dikemukakan pengertian dan efisiensi terlebih dahulu.

## **2.2 Penerimaan**

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh perusahaan hasil dari penjualan produksinya.

Pendapatan daerah menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan asli daerah.

Pembiayaan menurut pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
3. Dana cadangan daerah.
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.



### **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber terpenting bagi setiap daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber terpenting pendapatan asli daerah yang dominan setelah retribusi adalah pajak daerah. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara jelas mengatakan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darise, Nurlan, 2007:45).

Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagai mana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun pendapatan asli daerah tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa jenis pajak itu diserahkan masing-masing baik kepada daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Adapun yang menjadi kewenangan daerah provinsi dalam pemungutan pajak daerah meliputi:

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan.
5. pajak rokok.

Sedangkan bagi daerah kabupaten/kota sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah ini meliputi:

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak reklame.
4. Pajak hiburan.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung walet.
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea balik nama hak atas tanah dan bangunan.

Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## **2.4 Pajak**

PJA. Adriani (dalam Bohari, 2008 : 23) memberikan definisi sebagai berikut pajak adalah iuran pada negara yang dapat di pisahkan yang dihitung oleh wajib pajak pembayarannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang langsung dapat di tuju, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Siahaan, Marihot P (2005 : 7) Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara/pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dilaksanakan dan terutang oleh wajib membayarkannya dengan tidak mendapat presentase kembali/contra prestasi atau balas jasa, secara langsung yang dihasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Rochman Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa Timbal/contra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo : 2008: 1)

Pajak menurut Soeparman (Wahyu, 2007: 3) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Ismawan (2001 : 4) pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik(kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secarayuridis dapat di paksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh Wajib Pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat di lakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang, dan sandera.

Menurut Guritno Mangkoesoerbroto (Azwar, 2008 : 36) memberikan definisi pajak sebagai berikut, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut di dasarkan pada undang-undang pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidal ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

## **2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Afrizal (2009) menyebutkan ada 3 (tiga) cara pemungutan berdasarkan stelsel yaitu :

- a. Stelsel nyata (riil stelsel) yaitu Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
- b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) yaitu Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya, sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak Daerah ada 4 (empat) cara pemungutan pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- c. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- d. Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

## 2.6 Tinjauan Pajak Dalam Islam

Pajak dalam pandangan islam sebagai mana dalam firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 29 :

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Al-Taubah : 29)

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu per kepala yang di pungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan di mana dalam ayat di atas boleh diperangi bagi yang tidak mau membayar jizyah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berkalu, jika pajak di pungut menurut secara islam bagi yang enggan mambayar pajak dapat di tagih secara paksa, sita dan bahkan boleh di perangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di keluarkan.

## **2.7 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pembangunan daerah (Setiawan, Agus, 2006 : 349)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah yaitu dengan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersipat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral logom dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan dari pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.



6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Adapun pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai *Budgeter*, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Berfungsi sebagai *Regulatory*, karena pajak berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi masyarakat.

Jika dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Sementara itu, dapat dilihat pada pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

## **2.8 Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah**

Dalam penerimaan pajak agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau pajak mutlak untuk dilakukan, karena tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai baik dan tidaknya pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.

1. Hasil : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidaknya inflasi pertumbuhan penduduk
2. Keadilan : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang

3. Daya guna ekonomi : pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi
4. Kemampuan melaksanakan suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan tata usaha
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Selanjutnya berhubung dengan tolak ukur untuk menilai pajak daerah di atas Musqarve (dalam buku Waluyo, 2007 : 23) kemudian mengemukakan suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi kriteria antara lain :

1. *Benefit principle* dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat dan dinikmatinya dari pemerintah.
2. *Ability principle*, dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak di bebaskan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.
3. *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak ang bersangkutan) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.9 Pajak Reklame**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27, pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang di maksud dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah, harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten / kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimulai tanggal 1 Januari Tahun 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Sedangkan menurut Yani, Ahmad (2002 : 48) pajak reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial/digunakan untuk memperkenalkan mengajuskan atau memuji suatu jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat di baca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

## **2.10 Objek dan Subjek Pajak Reklame**

Objek pajak reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdapat pada Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 3 objek pajak reklame antara lain :

(1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(2) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat, striker.
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.
- g. Reklame apung.
- h. Reklame suara.
- i. Reklame film/ slide.
- j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 4 dijelaskan subjek pajak reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

#### **2.11 Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak reklame**

Selanjutnya dinyatakan bahwa sistem atau tata cara adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pola kerja (suatu totalitas) dalam rangka pelaksanaan bidang kerja, dengan kata lain pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai dengan pola kerja yang ditetapkan. Akan tetapi dalam pedoman petugas organisasi dan metode kerja yang diterbitkan oleh lembaga administrasi negara didefinisikan sebagai berikut:

- a. Sistem (sistem kerja) adalah suatu rangkaian daripada tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola teratur dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan.
- b. Prosedur (Prosedur Kerja) adalah rangkaian daripada tatakerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang pekerjaan.

Adapun sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame yang sudah ditetapkan Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yang dibuat oleh pemerintah daerah, adapun sistem dan prosedur dalam melaksanakan penerimaan pajak reklame tersebut yaitu:

1. Pendaftaran dan pendataan.
2. Perhitungan dan penetapan.
3. Pembukuan dan pelaporan.
4. Pembayaran dan pemungutan/penagihan

Tetapi harus diingat bahwa untuk terkoordinirnya penerimaan pajak reklame sangat di perlukan suatu organisasi yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir karena diketahui aktivitas yang dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya organisasi dan organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan.

Logis sekali apabila dikaitkan dengan peranan Dinas Pendapatan daerah selaku unsur pelaksanaan dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah yang meliputi fungsi pengungutan, koordinasi, dan pembinaan teknis penerimaan pajak dan retribusi daerah bahwa rangkaian pengelolaan organisasi akan menjadi fungsi keberhasilan tujuan yang di harapkan.

Sehubung dengan penerimaan pendapatan pajak daerah sektor pajak reklame yang telah diberlakukan/ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan nilai sewa objek pajak atas wajib pajak yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, maka keberhasilan pencapaian target tidak terletak ditangan Kepada Dinas Pedapatan semata melainkan rangkaian kerja sama seluruh unit kerja yang ada dengan melaksanakan sistem kerja yang sudah disusun

secara optimal. Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dalam sektor pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir khususnya melalui kegiatan pemungutan yang dilakukan, maka sistem kerja tersebut haruslah direalisasi secara menyeluruh dan optimal terhadap setiap satuan unit kerja yang ada disamping juga diperlukan kesadaran wajib pajaknya karena tugas pemungutan pajak reklame tidak akan mencapai target penerimaan tanpa adanya hubungan kerja sama yang baik diantara sesama petugas dan masyarakatnya.

## **2.12 Penetapan Kawasan / Zona**

Penetapan kawasan / zona pajak reklame dilakukan untuk menentukan besaran tarif pajak reklame yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame dan Penetapan Nilai Sewa Reklame Pasal 2 Penetapan Kawasan / Zona yaitu :

- (1) Kawasan reklame di wilayah Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan yaitu :

<b>No</b>	<b>Kawasan</b>	<b>Kelompok Yang Diliput</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	A	Jl. Lintas Sumatra	Tapal batas Kab. Bengkalis dan Kota Dumai hingga tapal batas Propinsi Sumatra Utara
		Jl. Lintas Ujung Tanjung – Bagan Siapiapi	-
		Kawasan Jembatan Pedamaran I dan II	Radius 1 Km
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>



		Kawasan Perkantoran Pekab Rokan Hilir	Batu IV
		Jl. Pahlawan, Jl. Perwira, Jl. Perniagaan, Jl. Merdeka, Jl. Kelenteng, Jl. Sumatera, Jl. Perdagangan, Jl. Bintang, Jl. Mawar, Jl. Aman, Jl. Sentosa.	Kota Bagan Siapiapi
2.	B	Seluruh Ibu Kota Kecamatan	Yang tidak termaksud kawasan A
		Seluruh Pasar Tradisional	Yang tidak termaksud kawasan A
		Seluruh Pelabuhan Laut	
		Jl. Lintas Bagan Siapiapi – Senaboi	
3.	C	Tidak Termaksud Kawasan A dan B dikategorikan menjadi kawasan C	

(2) Penetapan kawasan / Zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi dilapangan.

(3) Perubahan seperti yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati

### **2.13 Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif Pajak Reklame**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka semua peraturan daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Sesuai dengan undang-undang ini, daerah kabupaten diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, diantaranya pajak reklame.

Pengenaan pajak reklame harus memperhatikan asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan serta didukung oleh sistem administrasi perpajakan daerah yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan daerah tentang pajak reklame ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengatur pengambilan dan/atau pemanfaatan reklame guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak reklame salah satu pajak daerah yang memiliki peranan

penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan dibentuknya peraturan daerah ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dasar pengenaan dan tarif pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 pasal 6 yaitu:

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sama dengan nilai jual objek reklame (NJOR) ditambah nilai strategis pemasangan reklame (NSPR).
- (5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan factor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Selanjutnya dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 pasal 7 Perhitungan nilai jual objek pajak reklame didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame dengan indikator yang meliputi :

- a. Biaya pembuatan/konstruksi
- b. Biaya pemeliharaan
- c. Lama pemasangan
- d. Jenis reklame
- e. Luas bidang reklame, dan
- f. Ketinggian reklame

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 Tentang petunjuk pemungutan pajak reklame dan penetapan nilai sewa reklame Pasal 3 dijelaskan dasar pengenaan dan tarif pajak yaitu :

- (1) Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
- (3) Nilai Strategis Lokasi reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan mengalikan Jumlah Muka, Luas, Hari Pemasangan dan Tarif Strategis.

(4) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan mengalikan Jumlah Muka, Luas dan Tarif NOJP.

(5) Nilai Tarif Strategis sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan reklame dalam Sarana Pemerintah :

No	Kawasan	Dipasang Di dalam Gedung	Dipasang diluar gedung / Ruangan dengan ketinggian				
			0.00-10 M	10.01-20 M	20.01-30 M	30.01-40 M	Diatas 40 M
1	A	700	1.050	1.300	1.550	1.800	2.050
2	B	500	950	1.200	1.450	1.700	1.950
3	C	300	850	1.100	1.350	1.600	1.850

b) Penyelenggaraan reklame diluar Sarana Pemerintah

No	Kawasan	Dipasang Di dalam Gedung	Dipasang diluar gedung / Ruangan dengan ketinggian				
			0.00-10M	10.01-20 M	20.01-30 M	30.01-40 M	Diatas 40 M
1	A	600	900	1.250	1.400	1.650	1.900
2	B	400	800	1.150	1.300	1.550	1.800
3	C	200	700	950	1.200	1.450	1.700

(6) Nilai Tarif Jual Objek Pajak Reklame (NOJP) sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

No	Ukuran Luas Reklame	NOJP Rata-rata
1.	A. Rekalame di Luar Gedung / Bangunan	
	00.00 M2 s.d 10.00 M2	Rp.112.500
	10.01 M2 s.d 30.00 M2	Rp. 125.000
	30.01 M2 s.d 50.00 M2	Rp. 137.500
	50.01 M2 s.d 100.00 M2	Rp. 150.000
	100.00 M2 lebih	Rp. 162.500

2.	B. Reklame di Dalam Gedung / Ruangan Semua Ukuran	Rp. 125.000
----	--	-------------

(7) Nilai tarif strategis sebagaimana dimaksud ayat (5) dan nilai jual objek pajak reklame (NOJP) sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

(8) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan mengenai Reklame Insidentil yaitu :

- (1) Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan mengalikan nilai jual obyek pajak reklame dengan jumlah hari pemasangan (NOJP x jumlah hari pemasangan)
- (3) Tabel reklame insidentil ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1	Reklame spanduk / umbul-umbul ukuran maksimal 6 m x 1 m	Rp. 8.000/Buah	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 5 (lima) Hari maksimal 90 (Sembilan puluh) Hari
2	Reklame Baliho	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 5 (lima)

			Hari maksimal 90 (Sembilan puluh) Hari
3	Reklame Melekat (sticker) - Ukuran diatas 50 cm2 - Ukuran dibawah 50 cm2	Rp. 1.000 / Lembar Rp. 500/Lembar	Sekurang- kurangnya 50 lembar, setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari
4	Reklame Selebaran	Rp. 300/Lembar	Sekurang- kurangnya 100 lembar, setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari
5	Reklame Berjalan/ Kendaraan	Rp. 2.00/ m2	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 Hari
6	Reklame Udara	Rp. 300.000/Hari	Penyelenggaraan minimal 30 hari
7	Reklame Suara	Rp. 12.000/Menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kalipenyelenggaraan minimal 5 menit / hari
8	Reklame slide atau film atau multi media lainnya - Dengan suara - Tanpa suara	Rp.8.000/Menit Rp.4.000/Menit	Jangka waktu minimal 10 menit/ hari
9	Reklame Wall Painting	Rp. 2.000/m2	Setiap penyelenggaraan ditetapkan selama 365 hari
10	Reklame Apung	Rp.30.000/Buah	Penyelenggaraan minimal 30 hari
11	Reklame Peragaan	Rp.40.000/Hari	

(4) Tabel reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **2.14 Tata Cara Penetapan Dan Pemungutan Pajak Reklame**

Dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No 12 Tahun 2011 Pasal 12 bagian kedua dijelaskan tata cara penetapan dan pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis, nota perhitungan.
- (4) Tatacara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Sementara dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 13 bagian ketiga dijelaskan mengenai surat tagihan pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 Bagian keempat dijelaskan mengenai tata cara pembayaran pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak diatur dengan peraturan Bupati.

Selanjutnya dalam Pasal 15 dijelaskan mengenai tata cara pembayaran pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Selanjutnya Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 16 Bagian kelima dijelaskan mengenai tata cara penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 17 Bagian kelima dijelaskan mengenai tata cara penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

(3) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 18 Bagian kelima dijelaskan mengenai tata cara penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 19 Bagian kelima dijelaskan mengenai tata cara penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

(1) Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi jumlah pajak yang terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelangan kepada Kantor Pelelang Negara.

(2) Setelah Kantor Pelelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Selanjutnya Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 20 Bagian kelima dijelaskan mengenai tata cara penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## **2.15 Defenisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33)

1. Penerimaan adalah suatu hasil yang di capai pemeritah daerah dalam hal ini pajak reklame dari pengusaha yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
3. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Pendaftaran dan Pendataan merupakan kegiatan turun kelapangan / masyarakat untuk memenuhi tujuan yang akan di capai.
5. Dinas pendapatan adalah suatu instansi pemerintahan sekaligus unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk kegiatan pemungutan pajak reklame.

6. Sistem adalah seperangkat komponen yang terikat secara fungsional satu dengan yang lainnyadan mempunyai tujuan tertentu.
7. Prosedur adalah rangkaian dari rangkaian dari awal hingga akhir yang tidak dapat dirubah susunan kegiatannya dalam proses administrasi.
8. Perhitungan dan Penetapan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan untuk menetapkan target penerimaan pajak.
9. Pembukuan dan Pelaporan merupakan kegiatan dimana pencatatan data-data tentang pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir sebagai pendoman untuk membuat realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir.

#### **2.16 Konsep Operasional**

Untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang di gunakan pada judul ini, maka akan di opsionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi

1. Pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan turun lapangan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah nilai sewa pajak reklame dan untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai.
2. Perhitungn dan Penetapan Pajak merupakan kegiatan dimana pengusaha penyelenggara reklame atau penyewa reklame yang telah mendaftarkan

usahanya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak reklamenya.

3. Pembukuan dan Pelaporan merupakan kegiatan dimana pencatatan data-data tentang pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir sebagai pendoman untuk membuat realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir.
4. Pembayaran dan Penagihan/Pemungutan merupakan kegiatan penarikan iuran pajak reklame yang ada di Kabupaten Rokan hilir.

Adapun indikator dalam penelitian ini peneliti mengambil dari Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame dapat dilihat dari tabel berikut:

**Table 2.6. Konsep Operasional Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.12 Tahun 2011 tentang pajak Reklame	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran dan pendataan</li> <li>2. Perhitungan dan Penetapan</li> <li>3. Pembukuan dan Pelaporan</li> <li>4. Pembayaran dan Penagihan/Pemungutan</li> </ol>

*Sumber : Dinas Pendapatan kabupaten Rokan Hilir 2012*

## **2.17 Penelitian Terdahulu**

Dari penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi Helvianti (2009), yang berjudul “Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangana jalan terhadap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan kabupaten Rokan Hilir-Riau”.

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat diambil kesimpulan:

1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui pos pajak reklame untuk tahun pengamatan 2004-2008 melebihi target dengan rata-rata 198,47% melalui pajak juga melebihi target dengan rata-rata 107,83%, dan untuk Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan melebihi target dengan rata-rata 158,35%.
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, pajak reklame dan pajak penerangan jalan untuk tahun pengamatan 2004-2008 mengalami penurunan meskipun ada peningkatan di beberapa tahun namun sangat kecil.
5. Selama tahun pengamatan 2004-2008, pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,11% terhadap Pendapatan Asli Daerah, pajak penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata 4,75% terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan untuk keseluruhan Pajak

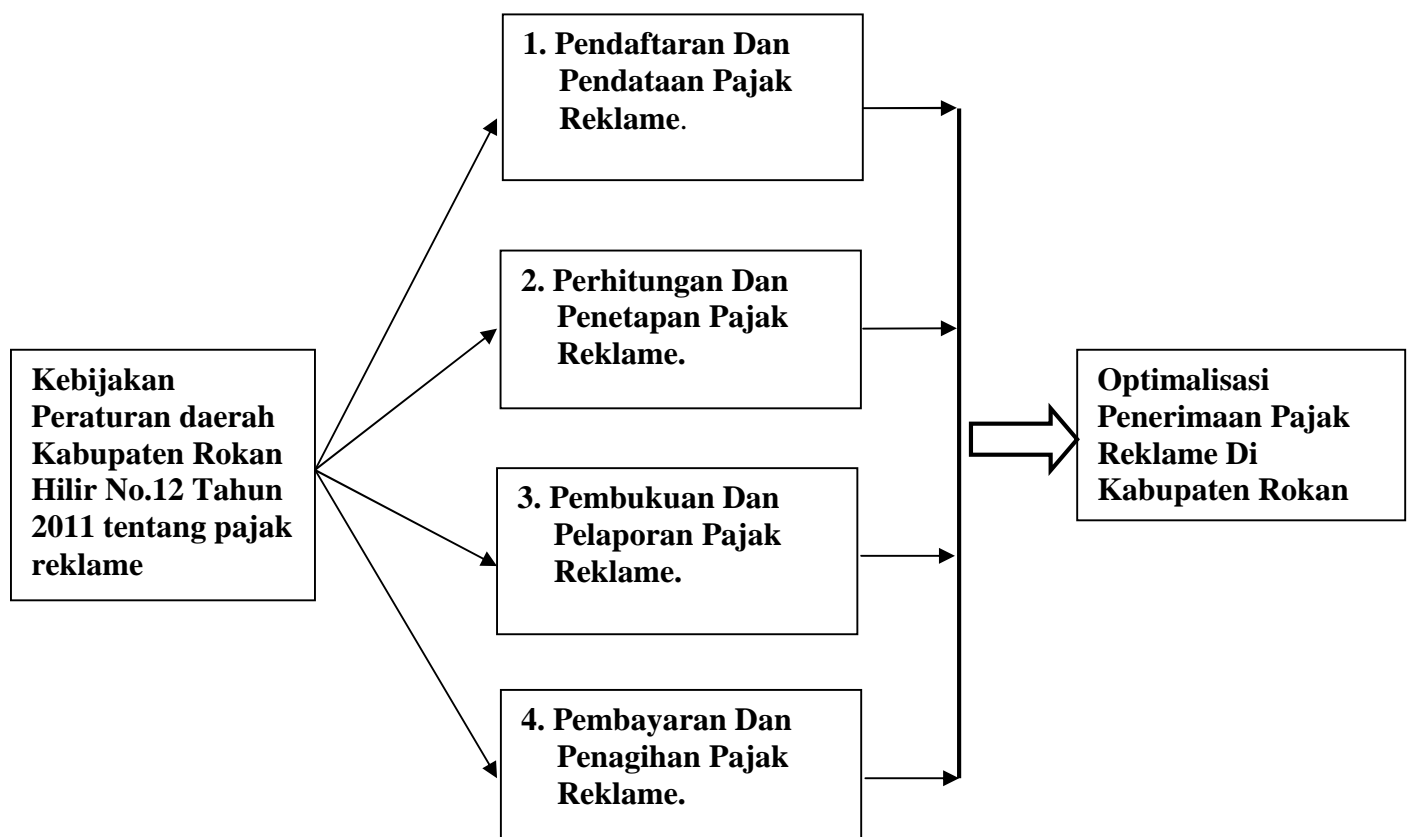


Daerah memberikan kontribusi rata-rata 5,79% terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

### 2.13 Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



*Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013*

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini dilakukan pada dinas penadapatan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan di pilihnya lokasi penelitian ini karena organisasi ini merupakan organisasi yang mengurus pengelolaan dan penerimaan pajak, termasuk juga pajak reklame. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2012 sampai selesai.

##### **1.2. Jenis dan Sumber Data**

1. Data primer yaitu data utama yang di peroleh langsung dari responden penelitian dilapangan mencakup :

Sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame yaitu :

1. Pendaftaran dan pendataan.
2. Perhitungan dan penetapan.
3. Pembukuan dan pelaporan.
4. Pembayaran dan pemungutan/penagihan.

2. Data skunder yaitu data pelengkap yang di peroleh dari pihak kedua guna melengkapi penelitian ini yang meliputi:

- a. Sejarah ringkas kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Susunan organisasi dan uraian tugas.

- d. Keadaan pegawai dan fasilitas kerja pada kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.
- e. Struktur organisasi kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.3. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari 85 orang PNS dan 61 orang Pegawai Honorer serta objek dari pajak reklame itu sendiri.

#### **2. Sampel**

Pengambilan sampel dari jumlah populasi yang dijadikan responden dari penelitian ini didasarkan pada teknik sampling purposive, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada cara ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan kepada pertimbangan pengumpul data yang berdasarkan atas pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu yang berkaitan dengan pajak reklame.

**Tabel 3. 1 : Keadaan Sub Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Optimalisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir**

<b>No</b>	<b>Sub Populasi</b>	<b>Populasi</b>	<b>Sampel</b>	<b>Persentase</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kabid Pendapatan Hasil Daerah	1	1	100%	Wawancara dan kusioner
2	Kabid Penagihan Dan Pembukuan	1	1	100%	Wawancara dan kusioner
3	Kabid Perencanaan dan Pendapatan	1	1	100%	Wawancara dan kusioner
4	Kasi Pendapatan Hasil Daerah	3	3	100%	Kuisisioner
5	Kasi Penagihan Dan Pembukuan	3	3	100%	Kuisisioner
6	Kasi Perencanaan dan Pendapatan	3	3	100%	Kuisisioner
7	Pegawai Staff Bidang Pendapatan Hasil Daerah	11	11	100%	Kuisisioner
8	Pegawai Staff Bidang Penagihan Dan Pembukuan	13	13	100%	Kuisisioner
9	Pegawai Staff Bidang Perencanaan dan Pendapatan	15	15	100%	Kuisisioner
Jumlah		51	51	100%	

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris. Sementara Kepala Bidang Pendapatan Hasil Daerah, Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pendapatan dalam penelitian ini dijadikan key informan dan juga Responden. Selanjutnya yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu Kasi dan Pegawai staf Bidang Pendapatan Hasil daerah, Kasi dan Pegawai Staff Bidang Penagihan Dan Pembukuan, dan Kasi dan Pegawai Staff Bidang Perencanaan dan Pendapatan.

#### **1.4. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang di butuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan terpimpin terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.
2. Angket/kuesioner adalah kegiatan dimana penulis akan memberikan lembaran pernyataan berserta pilihan jawabannya kepada responden berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini .

#### **1.5. Metode Analisis**

Untuk mengetahui penerimaan pajak Reklamedi Kabupaten Rokan Hilir, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi teori-teori yang

sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk Tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Ferkuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:

Setuju / Optimal : 67-100 %

Kurang Setuju / Kurang Optimal : 34-66 %

Tidak Setuju / Tidak Optimal : 0-33 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik dari penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir**

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota, tepatnya di jalan Merdeka No 58.

Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881,59 KM<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat dilayari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah, Sungai Rokan, Sungai Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko, dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah Sungai Rokan, yang panjangnya sekitar 350 KM.

Seperti layaknya daerah yang ada di Provinsi Riau yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Secara

geografis terletak Kabupaten Rokan Hilir di garis khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara  $26^0$  –  $32^0$ . Berdasarkan data yang ada menunjukkan hampir 52 rata-rata pada tahun 2008. Melihat keadaan ini berarti musim kering di daerah ini lebih panjang daripada musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan hanya 5 bulan.

Curah hujan di kabupaten Rokan Hilir terjadi pada bulan Januari mencapai 360.29 mm, kemudian akhir Januari menjelang Februari dapat mencapai 405.59 mm dan pada bulan Oktober – November mencapai 357.69 mm. Pada bulan-bulan lainnya kurang dari 300 mm dan di atas 100 mm. Keadaan ini menjadi perhitungan tersendiri bagi petani dan nelayan.

Topografi Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari daerah dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan pembentukan delta. Sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.



Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai di antara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah Sungai Rokan. Panjang Sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci bahan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketam, dan lain-lain)

Sungai Rokan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak asing lagi. Ia merupakan sumber aspirasi dan sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keadaan muara Sungai Rokan terjadi pendangkalan, karena adanya erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terbentuknya delta. Lebar Sungai Rokan hanya tinggal beberapa meter saja. Sungai bagi masyarakat Melayu adalah mempunyai beberapa peranan, seperti sebagai sarana transportasi (jalan raya sebelum adanya jalan darat) untuk menghubungkan satu kawasan pemukiman yang satu dengan yang lain, sumber kehidupan, tempat untuk bermain. Peranan yang sangat penting yaitu pengembangan teknologi lokal seperti pembuatan alat transportasi, penangkapan ikan dan sebagai tempat untuk berinovasi dan kreativitas anak-anak yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Jika Sungai Rokan hilang maka hilanglah kata, bahasa, tradisi, adat dan budaya. Artinya potensi yang bersumber dari air yang bernama Sungai Rokan sudah hilang di Bumi Negeri Seribu Qubah. Oleh karena itu, agar identitas, jati diri serta potensi dari Sungai Rokan terus berkembang, jaga keberadaan sungai tersebut, melalui pelestarian hutan dan bandar di daerah hulu. Jika hulu rusak, maka hilir juga

rusak. Apabila hulu baik, maka hilir juga akan baik. Untuk itu, pemimpin daerah yang berada di daerah aliran sungai (DAS), perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Agar kekayaan hari ini juga dinikmati oleh generasi berikutnya.

#### **4.2. Pemerintahan**

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-undang No.53 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini ibukotanya adalah di Ujung Tanjung. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar ibukota ditetapkan di Bagan Siapi-api. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupan kembali Kota Bagan Siapi-api sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi Ibukota Propinsi Bangko semasa kerajaan Siak Sri Indrapura, Bagan Siapi-api sebagai kota penghasil ikan dunia pada masa lalu. Berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota di Bagan Siapi-api ditunjuk sebagai ibukota Kabupaten. Alasan lain adalah sarana dan prasarana di Kota Bagan sudah memadai bila dibandingkan di daerah lain.

Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tanah Putih,
2. Kecamatan Kubu,
3. Kecamatan Bagan Sinembah,
4. Kecamatan Bangko dan
5. Kecamatan Rimba Melintang.

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 desa dan 11 desa persiapan. Pada saat itu, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan. Setelah hampir dua belas tahun berdiri Kabupaten Rokan Hilir, telah dibentuk 14 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1. TANAH PUTIH	SEDINGINAN	1,915.23	21.56
2. P U J U D	P U J U D	984.90	11.09
3. TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	MELAYU BESAR	198.39	2.23
4. RANTAU KOPAR	RANTAU KOPAR	231.13	2.60
5. BAGAN SINEMBAH	BAGAN BATU	847.35	9.54
6. SIMPANG KANAN	SIMPANG KANAN	445.55	5.02
7. K U B U	TELUK MERBAU	1,061.06	11.95
8. PASIR LIMA KAPAS	PANIPAHAN	669.63	7.54
9. BANGKO	BAGANSIAPAPI	475.26	5.35
10. SINABOI	SINABOI	335.48	3.78
11. BATU HAMPAR	BANTAYAN	284.31	3.20
12. PEKAITAN	PEDAMARAN	465.30	5.24
13. RIMBA MELINTANG	RIMBA MELINTANG	235.48	2.65
14. BANGKO PUSAKO	BANGKO KANAN	732.52	8.25
KABUPATEN ROKAN HILIR	BAGANSIAPAPI	8,881.59	100.00

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2012*

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah kabupaten yang terbaru, secara administrasi telah menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah No.41 Tahun 2007 organisasi perangkat daerah dibentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pada tahun 2011 usia Kabupaten Rokan Hilir memasuki tahun yang ke 12 (dua belas tahun). Pada tahun ini juga periodisasi dari pemerintahan secara otonom telah memasuki tahap ke II

(tahun ke enam). Untuk itu pemerintah Rokan Hilir menyusun rancangan pembangunan jangka menengah tahun ke enam periodisasi kedua. Rancangan pembangunan jangka menengah ini merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah menyusun 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD= Organisasi Perangkat Daerah). Salah satu dari 33 SKPD adalah Dinas Penapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Sumberdaya aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data yang tersedia dari BPS berjumlah 4.267, yang tersebar pada 42 Dinas, Instansi dan kantor. Apabila dilihat dari jenjang pendidikannya sebagian besar adalah berpendidikan diploma dan sekolah menengah. Untuk aparatur yang berpendidikan sarjana (Strata dua dan Strata satu) hanya 19.40 %. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas pendidikan bagi aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terutama untuk pendidikan formal yang mengarah pada aparatur pemikir untuk merancang pengembangan Kabupaten Rokan Hilir yang sesuai dengan Visi dan Misi pemerintah Rokan Hilir.

Aparatur Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang berpendidikan Strata dua tersebar pada 25 dinas, instansi dan kantor. Sumberdaya aparat yang berpendidikan S2 yang terbanyak adalah Pada Dinas Pendidikan yaitu sebanyak 14 orang, sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bappeda, Disperindag. Dinas, Instansi

dan Kantor lainnya hanya dua dan ada yang tidak ada sama sekali aparaturnya yang berpendidikan S2. Untuk aparatur yang berpendidikan sarjana strat satu sudah tersebar di seluruh dinas instansi dan kantor. Namun demikian, yang diperlukan adalah untuk peningkatan sumber daya aparat yang masih berpendidikan diploma dan menengah untuk diberikan motivasi untuk terus mengembangkan dirinya, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Agar sumberdaya aparat Rokan Hilir tidak tertinggal dengan sumberdaya aparat lain di Propinsi Riau. Kesemuannya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga Rokan Hilir Maju, sejahtera dan berdaya saing dapat tercapai.

Pembentukan dinas ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor, 11,12 dan 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2007, Bab XIII pasal 53 – 57. Sebagai instansi daerah, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) bertugas untuk melayani masyarakat, bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Rokan Hilir. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pelayanan sejalan dengan kedudukan, tugas fungsi (TUPOKSI) yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007. Bab. XIII pasal 53 – 57, yaitu organisasi perangkat daerah sebagai pelayan. Oleh karena itu, pelayanan itu dapat memenuhi persyaratan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, sesuai dengan standar yang ditentukan.

Apabila memungkinkan dapat melebihi apa yang ditetapkan (pelayanan prima = *service excellence*) sebagai pelaksana penerima mandat dari Bupati yang berasal dari masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan kaidah transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Untuk pencapaian pelayanan yang prima dan peningkatan kinerja, Dinas Pendapatan Daerah, perlu menyusun rencana agar memenuhi sendi-sendi tata laksana pelayanan umum seperti:

1. Kesederhanaan;
2. Kejelasan;
3. Kepastian;
4. Keamanan;
5. Kerterbukaan;
6. Efisiensi;
7. Efektivitas;
8. Ekonomis;
9. Keadilan.

Sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan sendi tata laksana pelayanan umum yang berpedoman pada TUPOKSI. Upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban untuk menyusun dan merumuskan Rencana Strategi (Renstra).

Adapun Visi Misi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan untuk tahun 2011-2016 dalam menjalankan tugas nya yaitu:

**VISI:**

“Terwujudnya intitusi modern dalam pengelolaan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah berwawasan lingkungan pada Tahun 2016”.

**MISI:**

1. Melakukan peningkatan: Intensifikasi, Eksitensifikasi, Eksploitasi, penggalian sumber-sumber penerimaan atau pendapatan-pendapatan daerah.
2. Melakukan peningkatan perumusan dan penyusunan rencana kerja penggalian potensi penerimaan yang sah dan penerimaan pendapatan daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana sebagai usaha untuk peningkatan penggalian dan penerimaan daerah.
4. Peningkatan kerjasama kepada instansi dan lembaga lain, untuk peningkatan penggalian penerimaan pendapatan daerah (Komunikasi, Koordinasi, Sinkronisasi) unit kerja internal dan eksternal.

**4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir****1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tugas dan fungsi Dinas Pendapatan
- b. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang pendapatan daerah

- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah

## **2. SEKTARIAT**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris selaku kepala sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan urusan umum kepegawaian, keuangan dan perencanaan program. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh sub bidang kesekretariatan. Antara lain ;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bidang Umum dan Kepegawaian bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan urusan umum dan kepegawaian.

- b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bidang Keuangan bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan keuangan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengendalian serta pengawasan penyelenggaraan keuangan dalam kegiatannya.

- c. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bidang Perencanaan Program bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan perencanaan dan program dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis serta pemutakhiran pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program untuk penerimaan pendapatan daerah dan, penggalan potensi daerah.

## **3. BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH**



Bidang Pendapatan Asli Daerah bertugas membantu Kepala Dinas dalam bidang melaksanakan penyiapan perumusan melaksanakan kebijakan dibidang pendapatan asli daerah (penerimaan penyiapan bahan penyusunan penerimaan, laporan kegiatan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan penerimaan pendapatan daerah) dibantu oleh:

a. Seksi Pendapatan Pajak dan Retribusi

Seksi Pendapatan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi dalam proses pendataan serta penyusunan petunjuk teknis tentang pajak dan retribusi.

b. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi

Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan tentang perhitungan pajak dan retribusi serta melakukan penetapan perhitungan besaran pajak dan retribusi.

c. Seksi Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Seksi Pemeriksaan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan, penerbitan, dan pendistribusian tentang pajak dan retribusi yang berkaitan.

#### **4. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN**

Bidang Penagihan dan pembukuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penagihan dan pembukuan.

a. Seksi Penagihan dan Perhitungan

Seksi Penagihan dan perhitungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melakukan penagihan dan perhitungan.

b. Seksi Pembukuan dan penerimaan

Seksi Pembukuan dan penerimaan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembukuan dan verifikasi.

c. Seksi Pelaporan

Seksi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam membuat laporan dari data-data pembukuan dan realisasi penerimaan secara periodik.

## **5. BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN**

Bidang perencanaan pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan di bidang perencanaan pendapatan.

a. Seksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Seksi peningkatan pendapatan asli daerah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan dan melakukan langkah-langkah intensifikasi (peningkatan) hasil pemungutan pendapatan daerah.

b. Seksi Pengembangan Pendapatan

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisa serta mengevaluasi data tentang berbagai sumber pendapatan daerah guna melakukan ekstensifikasi (pengembangan) sumber-sumber baru penerimaan sebagai pendapatan daerah.

c. Seksi Perundang-Undangan

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan dan perumusan kebijakan berupa peraturan-peraturan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pemungutan dan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah.

## **6. UPTD**

UPTD adalah unit pelayanan teknis dinas yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis Dinas Pendapatan dilingkup kecamatan, kelurahan dan kepenghuluan.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir, hambatan dalam sistem penerimaan pajak reklame serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir yang didapat melalui kuisioner serta wawancara sehingga akan diperoleh data yang akurat terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir.

#### **5.1 Identitas Responden**

Dalam melihat kemampuan pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis menguraikan secara singkat tentang identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin pegawai, tingkat usia/umur dan tingkat pendidikan pegawai. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana background responden yang dijadikan objek penelitian sehingga penulis dapat lebih mengenalinya.

##### **5.1.1 Jenis Kelamin**

Jenis kelamin mempunyai pengaruh terhadap sikap pegawai dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, dimana seorang pria biasanya bekerja lebih cepat dari wanita. Walaupun demikian wanita juga biasanya memiliki sikap yang lebih teliti dan rapi dalam melaksanakan pekerjaan dibandingkan pria.

Untuk lebih jelas keadaan pegawai yang menjadi sampel yang ada pada Dinas Pendapatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1 KlasifikasiJumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	65	Frekuensi	Persentase
1	Pria		35	68,63%
2	Wanita		16	31,37%
	<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir 2013*

Berdasarkan tabel diatas dapat diamati bahwa perbandingan antara jumlah pegawai pria dengan perempuan sangat jauh berbeda. Dimana pria sangat mendominasi yaitu sebanyak 35 orang atau sekitar 68,63%, sedangkan perempuan berjumlah 16 orang atau sekitar 31,37% dari keseluruhan jumlah pegawai.

### **5.1.2 Tingkat Usia/Umur**

Semakin bertambah usia seseorang maka jiwa kedewasaan akan terpatrit dalam sikap dan tingkahlaku yang selanjutnya akan mempengaruhi etos kerjanya. Kelompok kerja pegawai di bidang pendapatan hasil daerah, bidang penagihan dan pembukuan, dan di bidang perencanaan pendapatan pada Dinas Pendapatan kabupaten Rokan hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.2 Klasifikasi Jumlah Responden Menurut Tingkat Usia/Umur**

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	25-35 tahun	27	52,94%
2	36-45 tahun	15	29,41%
3	46 tahun-ke atas	9	17,65%
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir 2013*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa responden yang berada pada usia 25-35 tahun memiliki jumlah cukup besar yaitu sebanyak 27 orang atau sebesar 52,94%, untuk pegawai yang memiliki usia 36-45 tahun sebanyak 15orang atau sekitar 29,41%, sedangkan pegawai yang berusia 46 tahun ke atas berjumlah 9 orang atau sekitar 17,65%, dari keseluruhan jumlah pegawai.

### 5.1.3 Tingkat Pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan bagi penulis untuk memahami segala sesuatu yang menyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban-jawaban yang diberikan responden pada masalah variabel penelitian.Maka penulis terlebih dahulu melihat segi latar belakang tingkat pendidikan responden.

Dari 51orang pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini, secara umum dapat dikategorikan menurut 4 jenjang pendidikan, yaitu:

**Tabel 5.3 Klasifikasi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S.1	19	37,25%
2	S.2	1	1,90%
3	D.III	6	11,76%
4	SMA Sederajat	25	49,02%
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir 2013*

Dari tabel diatas dapat di lihat klasifikasi pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi responden berdasarkan tingkat pendidikan,

pegawai yang berpendidikan S.1 sebanyak 19 orang atau sekitar 37,25%. Dan pegawai yang berpendidikan S.2 berjumlah 1 orang atau sekitar 1,90%. Sedangkan jumlah pegawai pendidikan D.III berjumlah 6 orang atau sekitar 11,76%. Dan jumlah pendidikan SMA sederajat berjumlah 25 orang atau sekitar 49,02%.

## **5.2 Prosedur Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir**

### **5.2.1 Pendaftaran dan Pendataan**

Pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk menjaring secara optimal wajib pajak yang mempunyai kewajiban terhadap pajak daerah. Wajib pajak reklame melakukan pendaftaran kepada Dinas Pendapatan kemudian sebelum wajib pajak melakukan penyewaan/pemesanan reklame maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Dipenda Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kemudian petugas Dipenda Kabupaten Rokan Hilir melakukan pendataan kelapangan untuk mengetahui volume dan zona reklame dan di dokumentasikan, dan petugas menyampaikan SPTPD yang diisi oleh wajib pajak. Selain itu, penetapan pajak berdasarkan SPTPD tadi yang dituangkan dalam nota perhitungan. Kemudian setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak maka dilakukannya pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai indikator pendaftaran dan pendataan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dilihat dari tabel di bawah :

**Tabel 5.4 Tanggapan responden terhadap wajib pajak telah mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan dengan benar.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	5	9,80%
2	Kurang setuju	10	19,61%
3	Tidak setuju	36	70,59%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 responden atau 9,80% yang menyatakan setuju tentang wajib pajak telah mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan dengan benar, terdapat 10 responden atau 19,60% yang menyatakan kurang setuju wajib pajak telah mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan dengan benar, dan terdapat 36 responden atau 70,59% yang menyatakan tidak setuju wajib pajak telah mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan dengan benar.

Banyaknya responden yang menjawab tidak setuju bahwa wajib pajak telah mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan dengan benar, yaitu 36 responden atau 70,59%, mengindikasikan bahwa proses pendaftaran dan pendataan belum sepenuhnya diikuti dengan baik oleh wajib pajak reklame. Proses pendaftaran dan pendataan dimulai dengan wajib pajak reklame melakukan pendaftaran kepada Dinas Pendapatan kemudian sebelum wajib pajak melakukan penyewaan/pemesanan reklame maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Dipenda Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Setelah itu, wajib pajak memenuhi kewajiban wajib pajak yaitu



dengan melakukan penyetoran pajak reklame ke kas dengan menunjukan Surat Setoran Pajak Daerah. Rumitnya proses pendaftaran dan pendataan membuat sebagian besar wajib pajak tidak mengerti dan tidak sepenuhnya melakukan proses pendaftaran dan pendataan sesuai dengan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap semua wajib pajak reklame telah terdaftar di dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5 Tanggapan responden terhadap semua wajib pajak reklame telah terdaftar di dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	10	19,61%
2	Kurang setuju	11	21,57%
3	Tidak setuju	30	58,82%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap semua wajib pajak reklame telah terdaftar di dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir bahwa terdapat 10 responden atau 19,61% yang menyatakan setuju, terdapat 11 responden atau sekitar 21,57% yang menyatakan kurang setuju, sedangkan yang mengatakan tidak setuju, terdapat 30 responden atau sekitar 58,82%.

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden yang menyatakan tidak setuju dapat disimpulkan bahwa wajib pajak kurang mengikuti proses pendaftaran dan pendataan ke Dinas Pendapatan. Karena masih ada yang wajib pajak yang belum sadar mendaftarkan sendiri usahanya walaupun sudah 30 hari melakukan kegiatan usahanya tersebut dan bahkan ada wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya yang dilakukan nya, seperti pemasangan baliho caleg atau parpol yang dilakukannya . Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame memudahkan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.6 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame memudahkan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	8	15,69%
2	Kurang setuju	16	31,37%
3	Tidak setuju	27	52,94%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas menggambarkan wajib pajak reklame memudahkan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan, terdapat 8 responden atau 15,69% yang mengatakan setuju wajib pajak reklame memudahkan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan, terdapat 16 responden atau 31,37% yang menyatakan kurang setuju dan 27 responden atau 52,94% yang menyatakan tidak setuju.

Banyaknya responden yang menjawab bahwa wajib pajak reklame tidak memudahkan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan yaitu sebesar 27 responden atau sekitar 52,94 %. Menanggapi hal tersebut, selanjutnya peneliti mewawancarai salah seorang pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yang tidak memudahkan pegawai dalam melakukan pendaftaran dan pendataan sebagai berikut:

*“kurang pahamnya wajib pajak reklame dalam melakukan proses pendaftaran dan pendataan serta kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan reklamenya membuat kami kesulitan untuk melakukan pendataan terhadap wajib pajak. (Wawancara dengan SalahSeorang pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 9 juni 2013).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar wajib pajak tidak memahami proses pendaftaran dan pendataan serta kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan proses pendaftaran dan pendataan membuat pegawai dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir kesulitan untuk melakukan proses pendaftaran dan pendataan.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame memahami proses pendaftaran dan pendataan di Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.7 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame memahami proses pendaftaran dan pendataan di Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
----	-------------------	-----------	--------------

1	Setuju	7	13,73%
2	Kurang setuju	15	29,41%
3	Tidak setuju	29	56,86%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas dapat diketahui wajib pajak reklame memahami proses pendaftaran dan pendataan di Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir., terdapat 7 responden atau 13,73% yang menanggapi setuju, 15 responden atau 29,41% yang menanggapi kurang setuju dan terdapat 29 responden atau 56,86% menanggapi tidak setuju.

Banyaknya responden yang menjawab tidak setuju bahwa wajib pajak reklame memahami proses pendaftaran dan pendataan mengindikasikan wajib pajak reklame belum paham dengan proses pendaftaran dan pendataan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir. Sehubungan dengan hal tersebut pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir selaku unsur pelaksana perlu membentuk tim yang bertugas untuk memberikan pengarah dan penerangan mengenai proses pendataan agar wajib pajak dapat memahami proses pendaftaran dan pendataan dengan baik sehingga dapat memudahkan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame tepat waktu dalam melakukan proses pendaftaran dan pendataan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 5.8 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame tepat waktu dalam melakukan proses pendaftaran dan pendataan.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	5	9,80%
2	Kurang setuju	14	27,45%
3	Tidak setuju	32	62,75%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame tepat waktu dalam melakukan proses pendaftaran dan pendataan, terdapat 5 responden atau 9,80% yang menanggapi setuju bahwa wajib pajak reklame tepat waktu dalam melakukan proses pendaftaran dan pendataan, 14 responden atau 27,45% yang menanggapi kurang setuju, dan terdapat 32 responden atau 62,75% menanggapi tidak setuju bahwa wajib pajak reklame tepat waktu dalam melakukan proses pendaftaran dan pendataan.

Banyaknya responden yang menjawab tidak setuju bahwa wajib pajak reklame tepat waktu dalam melakukan proses pendaftaran dan pendataan yaitu sebesar 32 orang atau sebesar 62,75%, menunjukkan kurangnya kesadaran wajib pajak reklame dalam melakukan proses pendaftaran dan pendataan dengan tepat

waktu. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak, dilihat dengan masih banyaknya reklame yang menunggak pajak pada lokasi penelitian. Hal tersebut disebabkan karena informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir kepada wajib pajak masih kurang jelas dan hanya bersifat tertulis, yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame. Dan kurangnya sanksi yang tegas oleh pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Untuk lebih mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pendaftaran dan pendataan pajak reklame, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.9: Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pendaftaran Dan Pendataan.**

No	Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	5.4	5	9,80	10	19,61	36	70,59	51	100%
2	5.5	10	19,61	11	21,57	30	58,82	51	100%
3	5.6	8	15,69	16	31,37	27	52,94	51	100%
4	5.7	7	13,73	15	29,41	29	56,86	51	100%
5	5.8	5	9,80	14	27,45	32	62,75	51	100%
	Jumlah	35	68,63	66	129,41	154	301,96	255	500%
	Rata-rata	7	13,73	13	25,49	31	60,78	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel diatas diketahui tanggapan responden tentang pendaftaran dan pendataan, terdapat 7 responden atau sekitar 13,73% menyatakan setuju pendaftaran dan pendataan sudah berjalan dengan baik, 13 responden atau sekitar 25,49% menyatakan kurang setuju karena pendaftaran dan pendataan berjalan masih kurang

baik, dan terdapat 31 responden atau sekitar 60,78% menyatakan tidak setuju karena pendaftaran dan pendataan tidak berjalan dengan baik.

Dari tabel rekapitulasi di atas, dapat kita lihat bahwa mayoritas responden rata-rata menjawab tidak setuju, berdasarkan dari beberapa sumber yang peneliti wawancarai maka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir Masih dalam Kategori Tidak Baik. Menanggapi hal tersebut, selanjutnya peneliti mewawancarai salah seorang pemilik reklame yang belum mendaftarkan usaha reklame sebagai berikut:

*“Saya bukan tidak mau mendaftarkan reklame saya, tetapi prosedur yang terlalu panjang dan cukup rumit, serta masih banyak juga petugas yang “bermain” disitu, yang membuat kita enggan mau mendaftar (Wawancara dengan Bapak solehudin Salah Seorang pemilik reklame pada tanggal 8 juni 2013)*

Dari hasil rekapitulasi dan wawancara diatas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa banyaknya pemilik reklame yang tidak mendaftar usahanya dikarenakan selain kurangnya kesadaran mereka untuk mendaftar, faktor lain seperti prosedur yang rumit dan juga adanya penyalahgunaan wewenang dari pegawai Dispenda sehingga makin membuat pemilik reklame enggan untuk mendaftarkan diri untuk kemudian didata dan di kenakan wajib pajak reklame sesuai dengan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame .

### **5.2.2 Perhitungan dan Penetapan**

Dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame wajib pajak reklame wajib melaporkan kepada Bupati Rokan Hilir dalam hal ini yaitu Dinas

Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir tentang perhitungan dan penetapan serta melaporkan sendiri pajak reklamenya yang terhutang. Berdasarkan proses dari sistem penetapan pajak diawali dengan wajib pajak reklame mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dan wajib pajak menghitung jumlah pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif dasar pajak 25% dengan dasar pengenaan pajak ( $LR \times NSw \times NST$ ) dan mengembalikan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian atas dasar isian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dari wajib pajak reklame, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas pendapatan menetapkan pajak yang harus dibayar.

Setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maka dibebankan kepada setiap wajib pajak reklame yaitu sebesar 25% dan dikenakan tambahan untuk alkohol dan rokok sebesar 10% dari dasar pengenaan nilai sewa reklame. Adapun sebagai pelaksanaan dalam kegiatan perhitungan dan penetapan pajak ini adalah Bidang Pendapatan hasil daerah, penagihan dan pembukuan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai indikator perhitungan dan penetapan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 5.10 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame memudahkan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan perhitungan dan penetapan.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	8	15,69%



2	Kurang setuju	15	29,41%
3	Tidak setuju	28	54,90%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang wajib pajak reklame memudahkan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan perhitungan dan penetapan, terdapat 8 responden atau 15,69% yang menanggapi setuju tentang wajib pajak reklame memudahkan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan perhitungan dan penetapan, terdapat 15 responden atau 29,41% yang menanggapi kurang setuju tentang wajib pajak reklame memudahkan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan perhitungan dan penetapan dan terdapat 28 responden atau 54,90% yang menanggapi tidak setuju.

Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam proses perhitungan dan penetapan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dengan hanya dilakukan 1 tahun sekali, sosialisasi tersebut hanya membahas mengenai PAD yang didapat pada tahun sebelumnya, sehingga dirasa masih kurang untuk dapat memberikan informasi mengenai Pajak Reklame, sehingga membuat pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir kesulitan dalam melakukan proses perhitungan dan penetapan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai proses perhitungan dan penetapan wajib pajak reklame mengerti proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.11 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame mengerti proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	7	13,73%
2	Kurang setuju	14	27,45%
3	Tidak setuju	30	58,82%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang wajib pajak reklame mengerti proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah terdapat 7 responden atau 13,73% menanggapi wajib pajak reklame mengerti proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, 14 responden atau 27,45% menanggapi kurang setuju dan terdapat 30 responden atau 58,82% menanggapi wajib pajak reklame mengerti proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yang menjawab tidak setuju dapat disimpulkan bahwa kebanyakan wajib pajak tidak mengerti proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, dan mereka lebih memilih pegawai Dinas Pendapatan yang menghitung pajak reklame mereka.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame mematuhi proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.12 Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Mematuhi Proses Perhitungan dan Penetapan Yang dilakukan Oleh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	6	11,76%
2	Kurang setuju	13	25,49%
3	Tidak setuju	32	62,75%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame mematuhi proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 6 responden atau sekitar 11,76% menyatakan bahwa wajib pajak reklame mematuhi proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, 13

responden atau sekitar 25,49% menyatakan kurang setuju bahwa wajib pajak reklame mematuhi proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan terdapat 32 responden atau 62,75% yang menyatakan tidak setuju.

Banyaknya responden yang menjawab tidak setuju mengindikasikan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi dan melanggar proses perhitungan dan penetapan oleh sebab itu hal tersebut perlu diminimalisir agar pada tahun berikutnya bisa lebih baik dan masyarakat bisa paham akan pentingnya membayar pajak dan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir karena semua itu untuk pembangunan Kabupaten Rokan Hilir agar lebih maju dan berkembang lagi.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame jujur dalam proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.13 Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Jujur Dalam Proses Perhitungan dan Penetapan Yang dilakukan Oleh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	5	9,80%
2	Kurang setuju	16	31,37%
3	Tidak setuju	30	58,82%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame jujur dalam proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 5 responden atau sekitar 9,80% menyatakan wajib pajak reklame jujur dalam proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 16 responden atau sekitar 31,37% yang menyatakan kurang setuju dan terdapat 30 responden atau 58,82% yang menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang wajib pajak yang menjawab tidak setuju bahwa wajib pajak telah jujur dalam proses perhitungan dan penetapan dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak tidak sepenuhnya melaporkan semua reklame yang diselenggarakannya. Hal ini perlu untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendapatan agar wajib pajak jujur dalam melakukan proses perhitungan agar target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame tidak pernah melakukan protes terhadap hasil perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Table 5.14 Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Tidak Pernah Melakukan Protes Terhadap Hasil Perhitungan Pajak Reklame Yang dilakukan Oleh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	9	17,65%
2	Kurang setuju	14	27,45%
3	Tidak setuju	28	54,90%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame tidak pernah melakukan protes terhadap hasil perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 9 responden atau sekitar 17,65% menyatakan wajib pajak reklame tidak pernah melakukan protes terhadap hasil perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, 14 responden atau sekitar 27,45% menyatakan wajib pajak reklame tidak pernah melakukan protes terhadap hasil perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan terdapat 28 responden atau 54,90% yang menyatakan tidak setuju.

Banyaknya responden yang menjawab tidak setuju mengindikasikan bahwa kebanyakan wajib pajak melakukan protes terhadap hasil perhitungan dan penetapan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kerjasama yang baik antara pegawai Dinas Pendapatan dengan wajib pajak serta kurangnya pemahaman dari wajib pajak terhadap proses perhitungan dan penetapan. Agar tidak terjadinya protes dari wajib

pajak, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir perlu untuk melakukan sosialisasi terhadap proses perhitungan dan penetapan sehingga wajib pajak mengerti dan paham terhadap proses perhitungan dan penetapan, dan dapat menghitung pajak yang harus dibayarnya sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman wajib pajak terhadap hasil perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga proses perhitungan pajak reklame dapat diterima dan dipahami oleh wajib pajak reklame itu sendiri.

Untuk lebih mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap proses perhitungan dan penetapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Perhitungan dan Penetapan.**

No	Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	5.10	8	15,69	15	29,41	28	54,90	51	100%
2	5.11	7	13,73	14	27,45	30	58,82	51	100%
3	5.12	6	11,76	13	25,49	32	62,75	51	100%
4	5.13	5	9,80	16	31,37	30	58,82	51	100%
5	5.14	9	17,65	14	27,45	28	54,90	51	100%
	Jumlah	35	54,90	72	112,94	148	232,16	255	400%
	Rata-rata	7	13,73	14	27,45	30	58,82	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden dari indicator perhitungan dan penetapan, terdapat 7 responden atau sekitar 13,73% menyatakan setuju proses perhitungan dan penetapan sudah berjalan dengan baik, 14 responden atau sekitar 27,45% menyatakan kurang setuju karena proses perhitungan dan

penetapan masih berjalan kurang baik, dan terdapat 30 responden atau sekitar 58,82% menyatakan tidak setuju karena proses perhitungan dan penetapan tidak berjalan dengan baik.

Dari tabel rekapitulasi di atas, dapat kita lihat bahwa mayoritas responden rata-rata menjawab tidak setuju, berdasarkan dari beberapa sumber yang peneliti wawancarai maka proses perhitungan dan penetapan wajib pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir Masih dalam Kategori Tidak Baik. Menanggapi hal tersebut, selanjutnya peneliti mewawancarai salah seorang pemilik reklame yang menyatakan proses perhitungan dan penetapan wajib pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir Masih dalam Kategori Tidak Baik sebagai berikut:

Wawancara dengan Kasi Penetapan pajak dan retribusi Ibu Evisah Riya, SE, mengatakan bahwa penetapan target telah kami lakukan dengan benar sesuai dengan pendapatan pajak tahun sebelumnya, tapi terkadang terjadinya naik turun pendapatan yang berasal dari pajak reklame ini di karenakan sulitnya pegawai dinas pendapatan dalam menemui wajib pajak serta kurangnya tingkat kejujuran dari wajib pajak reklame dalam proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.

### **5.2.3 Pembukuan dan Pelaporan**

Setelah melakukan pemungutan terhadap objek pajak, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir akan melakukan pembukuan dengan menghimpun data dari hasil pemungutan berdasarkan objek pajak reklame, subjek pajak reklame dan penentuan pajak yang terhutang, dan objek pajak yang telah tutup dengan klasifikasi



nama kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hilir, lalu dibuat dalam jurnal disertai buku pembantu wajib pajak dan kemudian melaporkan hasil pajak kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) dalam bentuk buku besar sesuai masa pajak.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai indikator pembukuan dan pelaporan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 5.16 Tanggapan Responden Terhadap Wajib Pajak Reklame Setiap Tahunnya Menyelenggarakan Pembukuan dan Laporan Sendiri.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	6	11,76%
2	Kurang setuju	13	25,49%
3	Tidak setuju	32	62,75%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas menggambarkan tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame setiap tahunnya menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan sendiri, terdapat 6 responden atau sekitar 11,76% yang menyatakan setuju terhadap wajib pajak reklame setiap tahunnya menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan sendiri, terdapat 13 responden atau sekitar 25,49% menyatakan kurang setuju, terhadap wajib pajak reklame setiap tahunnya menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan sendiri,

dan terdapat 32 responden atau sekitar 62,75% menyatakan tidak setuju terhadap wajib pajak reklame setiap tahunnya menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan sendiri.

Banyaknya responden yang menjawab tidak setuju terhadap wajib pajak setiap tahunnya melakukan proses pembukuan dan pelaporan. Hal ini terjadi karena wajib pajak tersebut tidak mengerti dan kebanyakan wajib pajak hanya melakukan pemasangan reklame dalam jangka waktu yang tidak lama.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame telah sepenuhnya melaporkan penyelenggaraan reklamenya ke dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.17 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame telah sepenuhnya melaporkan penyelenggaraan reklamenya ke dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	7	13,73%
2	Kurang setuju	13	25,49%
3	Tidak setuju	31	60,78%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas diketahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame telah sepenuhnya melaporkan penyelenggaraan reklamenya ke dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, 7 responden atau sekitar 13,72%

menanggapi setuju, wajib pajak reklame telah sepenuhnya melaporkan penyelenggaraan reklamenya ke dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 11 responden atau sekitar 21,57% menyatakan kurang setuju terhadap wajib pajak reklame telah sepenuhnya melaporkan penyelenggaraan reklamenya ke dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan 33 responden atau sekitar 64,71% yang menyatakan tidak setuju karena wajib pajak reklame belum sepenuhnya melaporkan penyelenggaraan reklamenya ke dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan wawancara dengan responden yang menjawab tidak setuju terhadap wajib pajak reklame telah sepenuhnya melaporkan penyelenggaraan reklamenya ke dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak masih banyak yang belum sepenuhnya melaporkan penyelenggaraan reklamenya bahkan ada wajib pajak yang melakukan pemasangan reklamenya. Hal tersebut jelas merugikan bagi pemasukan Kas Kabupaten Rokan Hilir, oleh sebab itu maka Dinas Pendapatan perlu untuk melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame yang dilakukan oleh wajib pajak.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame memudahkan pegawai dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan proses pembukuan dan pelaporan dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.18 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame memudahkan pegawai dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan proses pembukuan dan pelaporan.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	8	15,69%
2	Kurang setuju	14	27,45%
3	Tidak setuju	29	56,86%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang wajib pajak reklame memudahkan pegawai dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan proses pembukuan dan pelaporan, terdapat 8 responden atau sekitar 15,69% menyatakan setuju wajib pajak reklame memudahkan pegawai dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan proses pembukuan dan pelaporan, terdapat 14 responden atau sekitar 27,45% menyatakan kurang setuju karena wajib pajak reklame kurang memudahkan pegawai dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan proses pembukuan dan pelaporan, dan 29 responden atau sekitar 56,86% menyatakan tidak setuju.

Dari jawaban responden yang menyatakan tidak setuju tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak reklame tidak memudahkan pegawai dinas pendapatan dalam melakukan proses pembukuan dan pelaporan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta kurangnya pemahaman wajib pajak tentang proses perhitungan pajak reklame, sehingga

menyulitkan pegawai Dinas Pendapatan dalam melakukan proses pembukuan dan Pelaporan.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap semua wajib pajak reklame telah mengikuti proses pembukuan dan pelaporan dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.19 Tanggapan responden terhadap semua wajib pajak reklame telah mengikuti proses pembukuan dan pelaporan.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	9	17,65%
2	Kurang setuju	15	29,41%
3	Tidak setuju	27	52,94%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data olahan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang semua wajib pajak reklame telah mengikuti proses pembukuan dan pelaporan, 9 responden atau sekitar 17,65% menyatakan setuju semua wajib pajak reklame telah mengikuti proses pembukuan dan pelaporan, terdapat 15 responden atau sekitar 29,41% menyatakan kurang setuju bahwa semua wajib pajak reklame telah mengikuti proses pembukuan dan pelaporan, dan 27 responden atau sekitar 52,94% menyatakan tidak setuju karena belum semua wajib pajak reklame mengikuti proses pembukuan dan pelaporan.

Menurut salah seorang responden yang menjawab tidak setuju, ada beberapa wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dengan tidak mengikuti proses

pembukuan dan pelaporan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan dari Dinas Pendapatan dalam proses pembukuan dan pelaporan

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap proses pembukuan dan pelaporan wajib pajak reklame dapat berjalan dengan baik, dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.20 Tanggapan responden terhadap proses pembukuan dan pelaporan wajib pajak reklame dapat berjalan dengan baik.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	12	23,53%
2	Kurang setuju	18	35,29%
3	Tidak setuju	21	41,18%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data olahan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang proses pembukuan dan pelaporan wajib pajak reklame dapat berjalan dengan baik, 12 responden atau sekitar 23,53% menyatakan setuju proses pembukuan dan pelaporan wajib pajak reklame dapat berjalan dengan baik, terdapat responden 18 atau sekitar 35,29% menyatakan kurang setuju proses pembukuan dan pelaporan wajib pajak reklame dapat berjalan dengan baik, dan 21 responden atau sekitar 41,18% menyatakan tidak setuju karena proses pembukuan dan pelaporan wajib pajak reklame belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang responden yang menjawab tidak setuju terhadap proses pembukuan dan pelaporan wajib pajak reklame dapat berjalan dengan baik, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kerjasama wajib pajak reklame terhadap pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya membuat proses pembukuan dan pelaporan ini tidak terlaksana dengan baik. Maka kerjasama antara wajib pajak reklame dengan pegawai dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir perlu untuk ditingkatkan lagi, sehingga proses pembukuan dan pelaporan ini dapat berjalan dengan baik.

Untuk lebih mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pembukuan dan pelaporan pajak reklame, maka dapat di lihat pada tabel di bawah:

**Tabel 5.21 Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Indikator Pembukuan dan Pelaporan.**

No	Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	5.16	6	11,76	13	25,49	32	62,75	51	100%
2	5.17	7	13,73	13	25,49	31	60,78	51	100%
3	5.18	8	15,69	14	27,45	29	56,86	51	100%
4	5.19	9	17,65	15	29,41	27	52,94	51	100%
5	5.20	12	23,53	18	35,29	21	41,18	51	100%
	Jumlah	42	82,36	73	143,13	140	274,51	255	500%
	Rata-rata	8	15,68	15	29,41	28	54,90	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel rekapitulasi di atas, setelah masing-masing pertanyaan di olah dan dianalisa kemudian dirangkum menjadi satu tabel rekapitulasi dan kemudian mencari rata-ratanya, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab Tidak setuju dari

indikator Pembukuan dan pelaporan yaitu sebanyak 28 orang atau sekitar 54,51% responden, kemudian diikuti dengan responden yang menjawab Kurang setuju yaitu sebanyak 15 orang atau 29,41% responden, dan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab setuju hanya sebanyak 8 orang atau 15,68% responden.

Tingginya jawaban responden yang memilih Tidak setuju dari indikator pembukuan dan pelaporan dikarenakan masih banyak pajak reklame yang belum terdata dan melakukan pelaporan untuk kemudian dapat dilaksanakan kegiatan pembukuan.

*“untuk masalah pembukuan dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah masih belum optimal, hal ini ditandai dengan masih banyak teman-teman penyelenggara reklame yang lain yang belum tercatat dalam pembukuan, selain itu juga penyelenggara reklame banyak yang sulit ditemui untuk dikonfirmasi dalam pembukuan dari dinas. kadang-kadang saya juga merasa tidak adil, selain itu juga tidak ada tindakan tegas dari pemerintah kepada oknum yang “bermain” di situ dan saya juga berharap teman-teman penyelenggara reklame juga bisa sadar dan mau bayar pajak reklame mereka.”(Wawancara dengan salah seorang penyelenggara reklame pada tanggal 10 juni 2013)*

Dari hasil wawancara dan rekapitulasi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai kegiatan pembukuan dan pelaporan bahwa kegiatan tersebut masih belum dapat berjalan maksimal, hal ini salah satunya disebabkan kurangnya kerjasama antara pemilik penyelenggara reklame dengan pihak pemerintah, serta kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak reklame dalam melaporkan penyelenggaraan reklamenya dan kurang tegasnya Dinas Pendapatan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan penyelenggaraan reklamenya sehingga kegiatan pembukuan dan pelaporan bahwa kegiatan tersebut masih belum dapat berjalan maksimal.



#### **5.2. 4 Pembayaran dan Penagihan/Pemungutan**

Kegiatan pembayaran dan pemungutan atau penagihan merupakan proses akhir dari tahapan-tahapan dalam sistem penerimaan pajak reklame. Pembayaran yang dilakukan atas pajak terhutang yang dilakukan oleh wajib pajak reklame adalah penyetoran. Adapun dalam tahap ini sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembayaran pajak reklame yaitu sebagai berikut:

Pasal 14 :

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang nya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 :

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terhutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Jadi dalam pembayaran pajak reklame telah di tentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 14 dan pasal 15.

Selain itu, sistem dalam proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir menggunakan sistem *Offical assesment* yaitu suatu sistem dimana wajib pajak

membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan bupati atau pejabat yang ditunjuk atas laporan yang disampaikan. Kemudian pemungutan pajak tidak dapat diborongkan atau tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Sedangkan yang dibolehkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga yaitu mencetak formulir-formulir perpajakan dan pengisian surat-surat kepada wajib pajak.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai indikator pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak reklame di Kabupaten Rokan hilir, maka dapat di lihat pada jawaban responden di bawah ini:

**Tabel 5.22 Tanggapan responden terhadap sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak reklame berjalan dengan baik.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	16	31,37%
2	Kurang setuju	14	27,45%
3	Tidak setuju	21	41,18%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas menggambarkan tanggapan responden terhadap sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak reklame berjalan dengan baik, terdapat 16 responden atau sekitar 31,37% yang menyatakan setuju sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak reklame berjalan dengan baik, terdapat 14 responden atau sekitar 27,45% menyatakan

kurang setuju, sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak reklame berjalan dengan baik, dan terdapat 21 responden atau sekitar 41,18% menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kabid penagihan dan pembukuan Ibu Hj. Aisyah, S.Sos, mengatakan :*“dalam proses penagihan dan perhitungan pajak reklame kami menemukan beberapa kendala seperti, wajib pajak yang tidak berada ditempat, wajib pajak yang menunda pembayarannya, serta wajib pajak yang sering mengajukan keberatan dilapangan walaupun kami sudah menunjukkan bukti-bukti berupa SPTPD yang kami bawa kelapangan”*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa kurangnya kerjasama antara wajib pajak dengan pegawai dinas pendapatan. Ketidak tegasan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam menindak wajib pajak reklame yang menunggak menyebabkan wajib pajak kurang mematuhi aturan dari pemerintah.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame tepat waktu dalam membayar pajak reklamenya dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.23 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame tepat waktu dalam membayar pajak reklamenya.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	5	9,80%
2	Kurang setuju	13	25,49%
3	Tidak setuju	33	64,71%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel di atas menggambarkan tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame tepat waktu dalam membayar pajak reklamenya terdapat 5 atau 9,80% mengatakan setuju, terdapat 13 atau 25,49% mengatakan kurang setuju, serta terdapat 33 responden atau 64,71% mengatakan tidak setuju. Dari table diatas dapat kita lihat mayoritas responden menjawab tidak setuju wajib pajak reklame tepat waktu dalam membayar pajak reklamenya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang responden yang menjawab tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak reklame cenderung menunda-nunda pembayaran pajak reklamenya, serta ketidak tegasan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam menindak wajib pajak reklame yang menunggak sangat mempengaruhi dalam pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Padahal pajak tersebut berfungsi sebagai pendanaan bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tujuan untuk kemajuaan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame melakukan pembayaran sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.24 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame melakukan pembayaran sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	6	11,76%
2	Kurang setuju	12	23,53%

3	Tidak setuju	33	64,71%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame melakukan pembayaran sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, terdapat 6 responden atau sekitar 11,76% menanggapi setuju, 12 responden atau sekitar 23,53% menanggapi kurang setuju, dan terdapat 33 responden atau sekitar 64,71% menanggapi tidak setuju, karena wajib pajak reklame belum melakukan pembayaran sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Banyaknya responden yang menjawab tidak setuju diakarekan oleh banyaknya wajib pajak reklame yang membayar pajak diluar waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, serta kurangnya sanksi yang tegas dari Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir terhadap wajib pajak reklame yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga wajib pajak merasa tidak ada sanksi bagi pelanggar prosedur tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame mematuhi sistem dan prosedur dalam proses pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak reklame dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.25 Tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame mematuhi sistem dan prosedur dalam proses pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak reklame.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
----	-------------------	-----------	--------------

1	Setuju	8	15,69%
2	Kurang setuju	13	25,49%
3	Tidak setuju	30	58,82%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel diatas dapat di lihat tanggapan responden terhadap wajib pajak reklame mematuhi sistem dan prosedur dalam proses pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak reklame, 8 responden atau sekitar 15,69% menyatakan setuju, terdapat 13 responden atau sekitar 25,49% menyatakan kurang setuju karena wajib pajak reklame belum mematuhi sistem dan prosedur dalam proses pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak reklame, dan 30 responden atau sekitar 58,82% menyatakan tidak setuju karena wajib pajak reklame tidak mematuhi sistem dan prosedur dalam proses pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak reklame.

Berdasarkan wawancara responden dengan salah seorang responden yang mengatakan tidak setuju terhadap wajib pajak reklame mematuhi sistem dan prosedur dalam proses pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak reklame. adalah dikarenakan menurut responden masih terdapat wajib pajak reklame yang kebingungan pada saat akan melaksanakan pembayaran pajak reklame. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap semua wajib pajak reklame sudah melunasi tunggakannya sebelum jatuh tempo pembayaran pada tabel berikut:

**Tabel 5.26 Tanggapan responden terhadap semua wajib pajak reklame sudah melunasi tunggakannya sebelum jatuh tempo pembayaran.**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	5	9,80%
2	Kurang setuju	12	23,53%
3	Tidak setuju	34	66,67%
	Jumlah	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel diatas dapat di lihat tanggapan responden terhadap semua wajib pajak reklame sudah melunasi tunggaknya sebelum jatuh tempo pembayaran, 5 responden atau sekitar 9,80% menyatakan setuju, terdapat 12 responden atau sekitar 23,53% menyatakan kurang setuju karenabelum semua wajib pajak reklame melunasi tunggaknya sebelum jatuh tempo pembayaran, dan 34 responden atau sekitar 66,67% menyatakan tidak setuju karena masih banyak wajib pajak reklame belum melunasi tunggaknya sebelum jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasi penagihan dan perhitungan, mengatakan : *“Pembayaran yang benar adalah pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran. Tapi pada kenyataannya dilapangan sebagian besar wajib pajak reklame masih banyak yang menunggak atau selalu menunda pembayaran sampai menjelang jatuh tempo atau tidak membayar pajak reklamenya. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklamenya membuat kami sulit untuk melakukan pemungutan /atau penagihan.*

Dari hasil wawancara di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa wajib pajak reklame masih banyak yang menunggak atau selalu menunda pembayaran sampai menjelang jatuh tempo yang telah ditentukan atau tidak membayar pajak reklamenya , dan kurangnya kesadaran wajib pajak reklame dalam memenuhi kewajibannya dalam pajak reklame membuat penerimaan pajak reklame kurang optimal. Oleh



karena itu Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir diharapkan agar memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak reklamenya, sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan optimal.

Untuk lebih mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pembayaran dan penagihan/pemungutan pajak reklame, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.27 Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Indikator Pembayaran dan penagihan/pemungutan.**

No	Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	5.22	16	31,37	14	27,45	21	41,18	51	100%
2	5.23	5	9,80	13	25,49	33	64,71	51	100%
3	5.24	6	11,76	12	23,53	33	64,71	51	100%
4	5.25	8	15,69	13	25,49	30	58,82	51	100%
5	5.26	5	9,80	12	23,53	34	66,67	51	100%
	Jumlah	40	78,42	64	125,49	151	296,09	255	500%
	Rata-rata	8	15,68	13	25,49	30	58,82	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Dari tabel rekapitulasi di atas, setelah masing-masing pertanyaan di olah dan dianalisa kemudian dirangkum menjadi satu tabel rekapitulasi dan kemudian mencari rata-ratanya, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab Tidaksetuju dari indikator Pembayaran dan penagihan/pemungutan yaitu sebanyak 30 orang atau sekitar 58,82% responden, kemudian diikuti dengan responden yang menjawab Kurang setuju yaitu sebanyak 13 orang atau 25,49% responden, dan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab setuju hanya sebanyak 8 orang atau 15,68% responden.

Tingginya responden yang menjawab tidak baik dikarenakan kegiatan Pembayaran dan penagihan/pemungutan belum terlaksana dengan optimal, hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemungutan yang belum merata, selain itu juga masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh pegawai yang tidak bertanggungjawab seperti pernyataan salah seorang wajib pajak yang peneliti wawancarai yaitu sebagai berikut:

*“Menurut saya pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Rokan Hilir ini masih belum baik, saya lihat masih banyak wajib pajak reklame yang tidak dimintai pajaknya, selain itu banyak pegawai dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, kami membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi tidak diserahkan kepada kas daerah. Hal inilah yang menurut saya kurang optimalnya penerimaan pajak daerah tersebut.” (Wawancara dengan salah seorang wajib pajak reklame pada tanggal 13 Juni 2013)*

Dari hasil wawancara dan rekapitulasi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak reklame yang belum terdaftar dan belum membayar pajak reklamenya, selain itu masih banyak pegawai pemungut pajak yang menyalahgunakan wewenangnya dalam pemungutan pajak reklame tersebut. Terdapat dua upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, yaitu : pertama, Intensifikasi, yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila diperlukan menaikkan pengenaan tarif yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga membentuk tim untuk bertugas memberikan pengarahan dan penerangan mengenai arti pentingnya membayar pajak bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Kedua, Ektensifikasi, yaitu mencari objek pajak reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak.

Untuk lebih jelas mengenai tanggapan responden terhadap pendaftaran dan pendataan, Perhitungan dan penetapan, Pembukuan dan Pelaporan, Serta Pembayaran dan Penagihan/Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.28 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hilir**

No	Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pendaftaran dan Pendataan	7	13,73	13	25,49	31	60,78	51	100%
2	Perhitungan dan Penetapan	7	13,73	14	27,45	30	58,82	51	100%
3	Pembukuan dan Pelaporan	8	15,68	15	29,41	28	54,90	51	100%
4	Pembayaran dan Penagihan/pemu ngutan	8	15,68	13	25,49	30	58,82	51	100%
	Jumlah	30	58,82	55	107,84	119	233,33	204	400%
	Rata-rata	7	13,73	14	27,45	30	58,82	51	100%

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel 5.28 dapat dilihat tanggapan responden terhadap sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 7 responden atau 13,73% menyatakan setuju dalam sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan efektif. Dan sebanyak 14 responden atau sekitar 27,45% menyatakan kurang setuju, karena sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir berjalan kurang efektif, sedangkan 30 responden atau 58,82% menyatakan tidak setuju dalam sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir tidak efektif.

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas responden menjawab proses pendaftaran dan pendataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir masih belum terlaksana dengan baik, yaitu sebesar 31 responden atau sekitar 60,78 %. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak reklame yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak, terutama pada tahun 2012 dimana target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir mencapai Rp.217.000.000 namun hanya terealisasi sebesar Rp. 143.842.909, oleh sebab itu hal tersebut perlu diminimalisir agar pada tahun berikutnya bisa lebih baik dan masyarakat bisa paham akan pentingnya membayar pajak karena semua itu untuk pembangunan Kabupaten Rokan Hilir agar lebih maju dan berkembang lagi. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir perlu untuk membentuk tim untuk bertugas memberikan pengarahan dan penerangan mengenai arti pentingnya membayar pajak reklame kepada masyarakat khususnya pengusaha dan pedagang. Kedua, Ektensifikasi, yaitu mencari objek pajak

reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak.

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan penerimaan pajak reklame oleh Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:

Baik	: 67-100 %
Kurang Baik	: 31-66 %
Tidak Baik	: 0-33 %

Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih dalam kategori Kurang Baik atau belum Optimal hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan 58,82%. Dikatakan Kurang Baik / Belum Optimal karena pelaksanaan penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang diukur melalui keempat indikator tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dan masih banyak terjadi masalah dilapangan baik dari Dinas Pendapatan Daerah maupun dari wajib pajak reklame itu sendiri, Seharusnya keempat indikator tahapan yaitu pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, pembukuan dan pelaporan sampai pada pembayaran dan pemungutan/penagihan dilaksanakan semaksimal mungkin karena keempat faktor inilah yang menentukan optimal atau tidaknya

penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tersebut.

Selama melakukan penelitian ini, ditemukan fenomena musiman yang saat ini terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yaitu adanya pemasangan spanduk atau baliho dari calon Legislatif maupun calon Gubernur yang tidak mendaftar dan membayar pajak reklame turut mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir selaku unsur pelaksana kegiatan penerimaan pajak reklame perlu untuk menerapkan tindakan atau sanksi seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame terhadap wajib pajak yang tidak mendaftar dan membayar pajak reklamenya.

Sanksi yang dapat diberikan terhadap wajib pajak reklame yang melanggar aturan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Pasal 13 bagian ketiga dijelaskan mengenai surat tagihan pajak yaitu sebagai berikut :

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

- a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 Bagian keempat dijelaskan mengenai tata cara pembayaran pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak diatur dengan peraturan Bupati.

Selanjutnya dalam Pasal 15 dijelaskan mengenai tata cara pembayaran pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Selanjutnya Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 16 Bagian kelima dijelaskan mengenai tata cara penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar



bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 17 Bagian kelima dijelaskan mengenai tata cara penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 18 Bagian kelima dijelaskan mengenai tata cara penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 19 Bagian kelima dijelaskan mengenai tata cara penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

- (1) Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi jumlah pajak yang terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelangan kepada Kantor Pelelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Pelelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1.Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan mengenai Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Di Kabupaten Rokan Hilir, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai akhir penulisan dan juga menjawab permasalahan Sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir

##### **1. Pendaftaran dan pendataan.**

Pelaksanaan dalam proses pendaftaran dan pendataan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari proses pengisian formulir pendaftaran wajib pajak, kemudian dikeluarkannya NPWP dan selanjutnya wajib pajak mengisi SPTPD setelah SPTPD diisi maka dilakukan pencetakan SKPD kemudian mengeluarkan SSPD. SKPD digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011. Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden menilai pendaftaran dan pendataan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-ratanya sebanyak 31 responden atau sekitar 60,78% dari keseluruhan jumlah responden yang mengatakan demikian pada table rekapitulasi indikator pendafrtran dan pendataan, hal ini dikarenakan oleh banyaknya pemilik reklame yang tidak mendaftarkan usahanya dan kurangnya kesadaran mereka untuk mendaftar, faktor lain seperti prosedur yang rumit dan juga adanya penyalahgunaan wewenang

dari pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir sehingga makin membuat pemilik reklame enggan untuk mendaftarkan diri untuk kemudian didata dan dikenakan wajib pajak reklame sesuai dengan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame.

## 2. Perhitungan dan Penetapan.

Dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak reklame sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 karena wajib pajak sendiri yang memperhitungkan dan membayar pajak serta melaporkan sendiri pajak reklame terhutangnya dengan SPTPD. Dasar pengenaan pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa dan khusus untuk produk rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan sebesar 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011. Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden menilai perhitungan dan penetapan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-ratanya sebanyak 30 responden atau sekitar 58,82% dari keseluruhan jumlah responden yang mengatakan demikian pada table rekapitulasi indikator perhitungan dan penetapan, hal ini dikarenakan kegiatan penghitungan dan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan sulitnya pegawai Dinas Pendapatan dalam menemui wajib pajak serta kurangnya tingkat kejujuran dari wajib pajak reklame dalam proses perhitungan dan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.

### 3. Pembukuan dan Pelaporan

Setelah melakukan pemungutan terhadap objek pajak maka akan dilakukan pembukuan dan menghimpun data dari hasil pemungutan berdasarkan objek pajak reklame, subjek pajak reklame dan penentuan pajak reklame kemudian dimasukkan dalam buku jurnal disertai buku pembantu wajib pajak dan kemudian melaporkan kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP). Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden menilai pembukuan dan pelaporan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-ratanya sebanyak 28 responden atau sekitar 54,90% dari keseluruhan jumlah responden yang mengatakan demikian pada tabel rekapitulasi indikator pembukuan dan pelaporan, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum terdata dan melakukan pelaporan untuk kemudian dapat dilaksanakan kegiatan pembukuan, hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama antara wajib pajak reklame dengan pihak pemerintah, serta kurangnya kesadaran wajib pajak reklame dalam melaporkan penyelenggaraan reklamenya dan kurang tegasnya Dinas Pendapatan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan penyelenggaraan reklamenya sehingga kegiatan pembukuan dan pelaporan tersebut masih belum berjalan dengan optimal.

### 4. Pembayaran dan penagihan/pemungutan.

Dalam melakukan pembayaran pajak reklame yaitu dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame yaitu pada pasal 15 dan pasal 16. Kemudian pada pelaksanaan penagihan

pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak reklame yang belum membayar pajak. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden menilai pembayaran dan penagihan/pemungutan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-ratanya sebanyak 30 responden atau sekitar 58,82% dari keseluruhan jumlah responden yang mengatakan demikian pada table rekapitulasi indikator pembayaran dan pemungutan/penagihan, hal ini dikarenakan kegiatan pemungutan/penagihan belum terlaksana dengan optimal, hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir. Selain berbedanya pola penetapan pajak reklame dari peraturan perundang-undangan sebelumnya dimana jika dalam peraturan sebelumnya reklame yang di pasang didalam gedung atau bangunan (*In Door*) dikenakan pajak, maka dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan sekarang reklame yang dikenakan pajak hanya reklame yang dipasang diluar gedung atau bangunan (*Out Door*). Selain itu kurangnya tingkat kejujuran pegawai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga pemungutan pajak reklame belum dapat terlaksana dengan maksimal.

## 6.2.Saran

Dari hasil pembahasan penelitian yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, disini peneliti akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak Reklame.adapun saran dari peneliti adalah:

1. Diharapkan calon Legislatif maupun calon Gubernur agar mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya untuk menambah pemasukan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Memberikan denda dan sanksi yang jelas dan sesuai dengan perundang-undangan tentang pajak daerah yang berlaku serta berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PajakReklame, sehingga timbul kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Melakukan sosialisasi secara kontinu dengan melakukan kerjasama dengan pihak yang berhubungan dengan hal pajak seperti ahli hukum untuk menjelaskan sanksi ataupun denda yang didapat bila melakukan pelanggaran.
4. Diharapkan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan pengawasan dilapangan terhadap wajib pajak dalam pemasangan pajak reklame.
5. Wajib pajak reklame hendaknya tepat waktu dalam membayar pajak reklame sehingga tidak terjadi penunggakan dan dikenakan bunga 2%.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 29.

Afrizal, 2009, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. UIN SUSKA.

Bohari. 2008. ***Pengantar Hukum Pajak***. Rajawali Pers; Jakarta.

*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah* 2009. Nuansa Aulia; Bandung

Ismawan, Indra. 2001. ***Memahami Reformasi Perpajakan***. PT.Gramedia; Jakarta.

Ismail, Tjip. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia Edisi 2007*. Yellow Printing.

Kansil, C.S.T. 2006. *Kitab Undang-Undang Otonomi daerah*. PT. Pradnya Paramita; Jakarta.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi 2008*. Andi Jogjakarta.

Setiawan, Agus dkk. 2006. *Perpajakan Umum*. PT. Raja Grafindo Prsada; Jakarta.

Siahaan P, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

Sugiyono. 2007. ***Motodologi Penelitian Administrasi***. Alfabeta; Bandung.

Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia; Jakarta.

Sumyar. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perpajakan*. Andi Offset.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat; Jakarta.



Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Rajawali Press; Jakarta.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

*Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir.*

*Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame Dan Penetapan Nilai Sewa Reklame.*

### **Media Internet**

<http://www.rohilkab.org>

<http://www.webstatschecker.com/stas/keyword/kabupaten-rokan-hilir>.

<http://duniaoptimasi.blogspot.com/2011/03/optimalisasi.htm>